

KONFLIK SEPARATISME PAPUA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMASI INDONESIA-AUSTRALIA

Oleh : Marta Ulina Sinaga

Email : martaolina2000@gmail.com

Pembimbing : Dr. Mhd. Saeri, M.Hum

Bibliografi : 12 Buku, 41 Jurnal, dan 28 situs web

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km.12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63277

Abstract

This paper will explain the conflict of separatism and its implications for the diplomatic relations between Indonesia and Australia. Papua's growing separatism conflict abroad led to the emergence of the internationalization of separatism issues in Papua. The increase in Indonesian diplomacy is expected to be Indonesia's way of maintaining the sovereignty of countries including Papua.

This study uses the perspective of constructivism and the theory of constructivism. The theory used in this study is qualitative research method using descriptive analysis. While data collection is launched with library research techniques consisting of books, news, journals and trusted websites.

This research proves that Indonesia is making efforts to improve diplomatic relations to Australia to suppress intervention in the Papua case by cooperating in several areas such as economy, health and education.

Keywords: Papua, Conflict, Separatism, Diplomacy

PENDAHULUAN

Sejarah diplomasi Indonesia-Australia yang sudah terjalin sejak 1945 sering mengalami kondisi pasang surut secara dinamis dari waktu ke waktu. Hal tersebut ditandai dengan adanya periode-periode dimana hubungan kedua negara Indonesia dan Australia berjalan stabil, hangat, kooperatif, terbuka dan saling mendukung. Begitu juga sebaliknya tidak jarang hubungan Indonesia-Australia mengalami kondisi yang menurun berubah menjadi memanas, dingin ataupun saling curiga, penuh ketegangan, dan kurang bersahabat¹. Hubungan diplomasi Indonesia dan Australia tergolong kedalam hubungan yang berbeda dari lainnya, dimana disatu sisi kedua negara ini menjanjikan berbagai peluang kerjasama yang baik namun, di sisi lain hubungan diplomasi kedua negara ini juga dipenuhi dengan berbagai tantangan dan ketegangan.² Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai perbedaan cara pandang diantara kedua negara dan bangsa bertetangga yang mengakibatkan perbedaan prioritas kepentingan.

Pada dasarnya, hubungan diplomasi antara kedua negara Indonesia dan Australia sering mengalami fluktuasi karena Indonesia-Australia sama-sama memiliki kepentingan dengan cara pandang yang berbeda, tetapi tidak jarang juga kedua negara ini memiliki sejumlah titik temu yang sama dalam kepentingan

nasionalnya. Kedekatan wilayah antara Indonesia dan Australia secara geografis merupakan salah satu faktor penyebab menguatnya aspek hubungan diplomasi antara Indonesia dan Australia.

Ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan Australia mulai muncul kembali ketika Lepasnya Timor-Timur dari Indonesia dengan adanya intervensi Australia. Pada saat itu Australia membantu Timor-Timur untuk lepas atau merdeka dari Indonesia hal tersebut dilakukan tujuannya bukan untuk membalas jasa rakyat Timor-Timur yang dahulu pernah membantu Australia untuk mencegah masuknya invasi ke Australia saat Perang Dunia II, melainkan Australia mempunyai kepentingan bisnis nasionalnya yang dikemas dengan maksud kemanusiaan.³

Pada Tahun 2006 Indonesia-Australia kembali mengalami ketegangan dimana Australia melakukan intervensi terhadap Papua dengan memperbolehkan Migrasi secara illegal yang dilakukan oleh 43 warga asli Papua dengan menggunakan perahu untuk bermigrasi ke Australia terdiri dari 30 laki-laki, 6 perempuan dewasa dan 7 orang anak-anak Indonesia yang berasal dari Papua. peristiwa tersebut mengundang respon dari Indonesia sebagai negara induk dari Papua

¹ Vinsensio M.A. Dugis.2015.Memperkokoh Hubungan Indonesia-Australia. Jurnal Global & Strategis Th.9 No.2.

² Chintya Magdalena Sinaga. Dinamika Hubungan Australia-Indonesia Dalam Bidang Politik (2010-2015). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. (2014)

³Mike Head, Australia Menggertak Timor Timur "Merdeka" Atas Minyak Dan Gas, <http://www.wsws.org/id/2002/mei2002/timo-m30.shtml>. (diakses pada 04 september 2020)

Kerangka Teori

a. Perspektif Konstruktivisme

Penelitian ini menggunakan perspektif konstruktivisme, pada umumnya perspektif konstruktivisme membahas tentang suatu kepercayaan yang mengatakan bahwa faktor yang dapat menyatukan manusia. Perspektif Konstruktivisme dalam studi Hubungan Internasional memiliki dua kunci utama yang berhubungan dengan perspektif konstruktivisme yaitu: *pertama*, dilandasi oleh ide atau gagasan yang sudah disetujui bersama, *kedua*, adanya kepercayaan bahwa kepentingan aktor utama itu lebih ditentukan oleh persetujuan bersamadari pada faktor-faktor alam yang mempunyai arti bahwa setiap tindakan aktor tidak hanya ditentukan oleh dorongan tertentu atau kepentingan dari dalam diri sendiri akan tetapi hal tersebut dibentuk oleh interaksi antar individu dalam lingkungan di sekitarnya seperti (struktur politik, sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya).

Perspektif konstruktivisme menyimpulkan bahwa negara adalah aktor utama yang paling penting, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa aktor lain selain negara juga dapat mengambil peran.⁴ Perspektif konstruktivisme mempunyai tujuan untuk menjelaskan realitas hubungan internasional yang sejatinya mereka anggap sebagai keputusan bersamadari para pelaku kerjasama internasional.

⁴Sugiarto Pramono dan Andi Purwono, Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik

Konstruktivisme melihat dengan cara yang berbeda pada beragam dimensi yang bersifat membangun gagasan sebagai akibat interaksi di antara para aktor-aktor, seperti isu, identitas, nilai, norma, opini, wacana, budaya dan lain sebagainya⁵. Konstruktivisme dikenal sebagai perspektif yang mengutamakan negara dan lembaga internasional, mempunyai nilai umum yaitu Kerjasama, pembuatan aturan dan penegakan hukum, Lembaga tersebut mempromosikan norma dan nilai. Konstruktivisme juga menjelaskan tentang struktur anarkis sistem internasional diciptakan dan diabadikan oleh negara-negara bagiannya. Politik dalam negeri terintegrasi dengan politik global. Negara adalah aktor yang paling penting, tetapi organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah juga penting. Norma adalah bagian dari identitas aktor yang membentuk tindakan mana yang diinginkan atau bahkan mungkin. Konstruktivisme dalam Sistem internasional telah diubah secara radikal sebelumnya, dan itu bisa terjadi lagi (baik atau buruk).

b. Tingkat Analisa : Negara Bangsa

Level analisis sistem internasional juga disebut sebagai tingkat analisis yang komprehensif atau mencakup hal yang luas dengan baik daripada level analisis lainnya karena dapat memberikan pola umum tentang suatu perilaku negara dengan tingkat ketergantungannya terhadap negara lain.

⁵ Ibid.

c. Teori Konstruktivisme

Teori pada umumnya dapat didefinisikan sebagai penyederhanaan dari suatu fenomena dan menjadi sebagai sarana untuk analisa sehingga fenomena yang akan diteliti lebih mudah untuk dipahami. Konstruktivisme memfokuskan pada kepentingan dan identitas negara. Menurut Konstruktivisme setiap tindakan dari suatu negara pada dasarnya di bentuk oleh *meanings* dengan lingkungan sekitarnya. Tindakan setiap negara dalam konstruktivisme dapat memberikan pengaruh terhadap bentuk sistem internasional, begitupun sebaliknya sistem internasional tersebut juga dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku setiap masing-masing negara.

Teori konstruktivisme memiliki konsep berpikir bahwa dunia sosial termasuk hubungan internasional yang merupakan hasil konstruksi manusia, sehingga konstruktivisme lebih menekankan pada peran norma dalam perilaku masyarakat. Sebagai contoh didalam suatu kebijakan luar negeri, tidak hanya berfokus kepada masalah kepentingan nasional saja, tetapi juga berfokus kepada perilaku yang dapat diterima di masyarakat internasional.⁶ Konstruktivisme memberikan fokus kajiannya terhadap persoalan-persoalan bagaimana ide dan identitas terbentuk, bagaimana ide dan identitas tersebut dapat berkembang serta bagaimana ide dan identitas dapat membentuk pemahaman suatu negara dan merespon kondisi di sekitarnya.

⁶ Restilia Polli. M.si, Teori Hubungan Internasional, Konstruktivisme. <http://dosen.uta45jakarta.ac.id/downlot.php?file=THI%2010%20Konstruktivi%20vis.pptx>. (diakses pada 13 November 2020)

Dalam mengkaji sebuah Negara konstruktivisme mengatakan bahwa Negara merupakan aktor utamanya. Menurut Alexander Wendt tokoh konstruktivisme menyebut paham tersebut meyakini bahwa kehidupan sosial atau internasional adalah "*ideas all the way down*". Pandangan konstruktivisme terhadap fenomena sosial bahwa Struktur sosial terbentuk dari interaksi aktor-aktor sehingga dapat menciptakan ide atau sebuah gagasan. Dalam konstruktivisme sendiri terdapat beberapa sudut pandang dimana di satu sisi ada yang menekankan kajiannya terhadap persoalan identitas, seperti Alexander Wendt (1992, 1995, 1999); di sisi lainnya seperti Nicholas Onuf (1989) mengkajinya sebagai *rule/rules* dan *speech act*.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konferensi Meja Bundar

Sejarah mencatat bahwa awal mula permasalahan yang terjadi di Papua ketika adanya perbedaan pandangan antara pihak Indonesia dengan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949. Dalam perundingan tersebut pihak Indonesia dan Belanda tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai wilayah kedaulatan Indonesia.⁸ Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan pada 25 Agustus 1949 – 2 November 1949 di Den Haag, Belanda diadakan untuk menangani kasus separatisme di Papua, selain menetapkan soal penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia yang pada saat itu disebut

⁷Cecep Zakarias El Bilad, Konstruktivisme Hubungan Internasional: Meretas Jalan Damai Perdebatan Antarparadigma. : 72-73

⁸ Syamsuddin Haris, *Indonesia Diambang Perpecahan*. Jakarta: Erlangga. 1999.

dengan Republik Indonesia Serikat (RIS), juga mengatur soal Papua. Namun hasil yang dikeluarkan oleh KMB dirasa kurang meyakinkan Belanda karena dokumen ataupun keputusan yang dikeluarkan KMB belum mengatur secara eksplisit mengenai status politik Papua maka dari itu keputusan yang dikeluarkan oleh KMB masih belum bisa menjadi solusi yang baik bagi penyelesaian Papua.

Sebagai tindak lanjut dari ketidakberhasilan KMB dalam menyelesaikan konflik Papua yang melibatkan Indonesia dan Australia, dalam butir ke 6, pasal 2 perjanjian KMB 1949 menyatakan bahwa “kedudukan Irian Barat akan dirundingkan antara kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat (RIS) setahun setelah perundingan”. Tetapi perundingan ini masih belum mencapai kesepakatan terkait dengan status Irian Barat. Selanjutnya dalam rangka melanjutkan perundingan tersebut, maka pada bulan Desember tahun 1950, Belanda dan Indonesia menyelenggarakan “Konferensi Khusus” di Hague-Belanda, namun baik Indonesia maupun Belanda masih belum mendapatkan satu titik temu kesepakatan dan saling mempertahankan kepentingannya masing-masing, dan yang mana Belanda semakin memantapkan *status quo* nya di Irian dan mempersiapkan pembentukan Irian sebagai sebuah Negara.⁹ Konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda yang memperebutkan wilayah Papua terjadi diakibatkan oleh salah satu faktor yaitu ketika Belanda dianggap sebagai pihak eksternal yang memegang kendali atas penanaman rasa anti Indonesia kepada

masyarakat Papua. Konflik antara Indonesia dan Belanda akan status Papua pecah setelah adanya Konferensi Meja Bundar (KMB). Dalam sidang KMB yang dihadiri oleh kedua pihak negara yang bersangkutan, Belanda menyatakan bahwa negaranya tidak mengakui Irian Barat (Papua) merupakan bagian wilayah Indonesia, begitupun sebaliknya Indonesia merasa keberatan atas pernyataan yang disampaikan Belanda dan menentang hal tersebut.

Penentuan Pendapat Rakyat (Referendum 1969)

Pada akhirnya tahun 1969 dalam Penentuan Pendapat Rakyat Pepera dilaksanakan. Pada tahun 1969 inilah diadakan PEPERA yang fungsi utamanya merupakan penentuan nasib oleh rakyat Papua sendiri. PEPERA menunjuk perwakilan yang dibentuk dari 8 kabupaten dalam penentuan referendum dengan persetujuan PBB, yang kemudian dari hasil referendum tersebut dapat membentuk sebuah Dewan Perwakilan. Namun sebenarnya dalam sebelum pelaksanaan PEPERA ini telah ditanamkan benih-benih gerakan separatis oleh pemerintah kolonial Belanda, yakni ketika Belanda berusaha menjadikan Papua sebagai sebuah Negara Merdeka dan diberi nama Nederlands Nieuw Guinea. Keinginan untuk merdeka ini diwujudkan dengan dibentuknya Dewan Papua atau Nieuw Guinea Raad yang kemudian disahkan pemerintah kolonial Belanda. Dewan Komite Nasional beranggotakan 21 orang mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh 70 orang Papua lainnya dan menghasilkan nama negara, nama bangsa, lagu kebangsaan serta bendera Bintang Kejora sebagai

⁹ Rycho Korwa, Proses Integrasi Irian Barat Ke Dalam Nkri

bendera resmi Papua.¹⁰ Kemudian setelah mendapat persetujuan dari Belanda bendera bintang Kejora Papua dikibarkan pada 1 Desember 1961.

Untuk menahan aksi separatis tersebut maka Pemerintah Indonesia melaksanakan operasi militer untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok separatisme. Indonesia yakin bahwa Papua merupakan wilayah bagian dari Indonesia sedangkan Belanda yang pada kala itu hanya memanfaatkan potensi sumber daya alam yang luar biasa yang dimiliki oleh Papua dan sangat berat hati untuk melepaskan Papua Barat masuk kedalam wilayah Indonesia. Proses panjang yang dilalui untuk menemukan jalan keluar tidak lagi melalui dilakukan secara damai karena Belanda telah mempersiapkan kemerdekaan untuk Papua Barat. Melihat hal tersebut pemerintah Indonesia tidak bisa tinggal diam, saat itu Presiden Indonesia Soekarno segera mencanangkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA).

Konflik militer dalam skala besar nyaris pecah setelah Indonesia mengerahkan pasukannya secara besar-besaran atau yang disebut dengan Operasi Jaya Wijaya untuk menggempur pasukan Belanda. Sebaliknya menanggapi respon dari Indonesia Belanda juga membentuk pasukan sukarelawan lokal bernama Papua Volunteer Corps (PVC) yang sudah terlatih baik dan sempat bertempur melawan pasukan Indonesia ketika melancarkan Operasi Trikora. Ketegangan kembali meningkat ketika Belanda mengetahui bahwa Indonesia

¹⁰ Syamsul Hadi, Disintegrasi Pasca Orde baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional. Jakarta: Yayasan Obor, 2007.

Pemerintah Indonesia membuat Kesepakatan perjanjian di bidang militer dengan Uni Soviet. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran yang luar biasa bagi bangsa barat. Perjanjian militer yang dilakukan Indonesia dengan Uni Soviet Dikawatirkan oleh Belanda karena bisa saja hal tersebut menjadikan Indonesia akan menjadi negara komunis. Maka dari itu Penasihat Keamanan Nasional McGeorge Bundy melobi Presiden A.S. John F. Kennedy untuk merundingkan rencana tentang transfer pemerintahan Nugini Barat ke Indonesia. Perjanjian New York dirancang oleh Robert Kennedy dan ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Agustus 1962. Ditetapkan bahwa Indonesia akan mengurus Papua secara administratif, yang dilanjutkan dengan referendum yang dinamakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) untuk menentukan apakah Papua bergabung dengan Indonesia atau menjadi negara Merdeka.

PEPERA dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1969 di bawah koordinasi Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa. (UNTEA) yang merupakan implementasi sementara badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas sebagai pengawas dari Irian Barat.

Kemunculan OPM

Istilah Separatis atau Separatisme ditujukan pada tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu

dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka.¹¹ Gerakan separatisme atau melakukan tindakan separatis merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan sebuah kedaulatan yang utuh atau dapat disebut dengan memisahkan wilayah untuk merdeka dan menjadi wilayah sendiri yang terbebas dari atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Latar belakang kemunculan OPM, dengan tujuan membebaskan Papua dan membatalkan hasil dari Act of Free Choice (PEPERA) yaitu dianggap melanggar kesepakatan New York. OPM lahir di wilayah Papua dari dua Fraksi Utama, Fraksi Pertama dipimpin oleh Asotek Demotekay yang lahir pada tahun 1963, dan kedua dipimpin oleh Terianus Arongger yang lahir pada tahun 1964.

Selanjutnya pada tahun 1965, dibentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau *Free Papua Movement* yang merupakan sebuah organisasi perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Yang memiliki tujuan untuk mengakhiri kekuasaan Indonesia atas Papua serta untuk menjadikan Papua sebagai negara yang merdeka atas wilayahnya sendiri. OPM kemudian banyak melakukan protes-protes serta upaya kemerdekaan dengan metode geriliya dimana kelompok separatisme masih menggunakan senjata tradisional seperti tombak, busur dan panah. Menurut Organisasi Papua Merdeka (OPM), bersatunya Papua Barat ke NKRI tidaklah sah. Papua berpendapat bahwa berdasarkan fakta sejarah Papua

Barat telah mendapatkan kemerdekaannya yaitu pada tanggal 1 Desember 1961 yang dideklarasikan oleh Nieu Guinea Raad. Maka dari itu, OPM bersikeras mempertahankan untuk mendapatkan kemerdekaannya sendiri atas Indonesia dengan membuat berbagai masalah dan propaganda untuk melawan pemerintah Indonesia.

Sejak awal, penyebutan untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini ialah kelompok separatis yang diklasifikasikan oleh pemerintah. OPM dapat disebut juga sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) karena ingin memisahkan diri dari Indonesia dan menciptakan pemerintahan baru. Akan tetapi OPM dalam tindak pidananya dapat di klasifikasikan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dikarenakan melakukan kejahatan secara bersama.

Kemunculan Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyebabkan timbulnya ketegangan yang dirasakan oleh para aparat keamanan di Papua. Sejak terbentuknya OPM di Papua sering sekali terjadi tindakan kriminal sebagai bagian dari aksi protes.¹² Konflik tersebut menimbulkan banyak dampak negative mulai dari banyak memakan korban jiwa, kerugian fisik, kegoyahan hubungan antara dari pihak pemerintah dengan penduduk sipil, bahkan menyebabkan pembangunan wilayah Papua melambat.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebuah nama organisasi yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada

¹¹ Yuniarti Dwi Pratiwi, "Mengatasi Gerakan Separatis Melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (Tinjauan Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional)", *Jurnal Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional*. Vol. 3 No. 1. (2017): 20

¹² Muhammad Nugroho Sugiyatno, *Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional*, Makassar. (2017): 25

setiap organisasi atau kelompok apapun baik yang berada di Papua maupun di luar negeri yang dipimpin langsung oleh pemuda-pemuda Papua. Gerak awal dari OPM ini pada awalnya berfokus di bawah tanah untuk menyusun strategi dan memperkuat kekuatan untuk melawan pemerintahan Indonesia.¹³ Hal tersebut dilaksanakan dengan menggunakan beberapa cara yaitu baik secara politik maupun secara fisik (kekerasan) bersenjata untuk dapat mencapai tujuan utamanya yaitu dapat memisahkan diri atau memerdekakan Papua dan lepas dari NKRI.

Penempatan kelompok bersenjata OPM ini dalam konsepnya masih menjadi masalah di Indonesia. Sebagian pihak menginginkan mereka diklasifikasikan sebagai kelompok teroris yang harus diselesaikan dengan berbagai cara. Namun disisi lain, sebagian pihak juga menginginkan mereka dimasukkan sebagai kelompok separatis sehingga TNI dapat turun tangan dalam pemecahan masalahnya. Pemerintah sebagai pihak lainnya dan juga penguasa tertinggi tetap tegas menyebut mereka sebagai Kelompok Kejahatan Bersenjata (KKB).

Keterlibatan Dukungan Politik Pihak Luar Terhadap Kasus Papua

Campur tangan yang dilakukan oleh pihak luar juga diberikan dalam bentuk dukungan politik. Gerakan geriliya yang terus dilakukan oleh OPM demi mencari dukungan politik untuk kemerdekaan Papua sampai kepada negara asing. Langkah diplomatik dibidang politik tersebut adalah

¹³ RG Djopari, Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka ; Suatu Studi Kasus Tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari Tahun 1964-1984. Jakarta: Universitas Indonesia, 1991.

menyebarkan aktifis ataupun mahasiswa ke beberapa negara seperti: Australia, Eropa, Kep. Pasifik, Amerika dll) dengan mengatasnamakan pendidikan padahal dibalik itu mereka menyebarkan dan menanamkan rasa ingin merdeka dan berdiri sendiri sebagai negara Papua. Diketahui bahwa OPM merupakan badan Politik yang tertinggi untuk mencari dukungan secara Internasional dan jalur hukum untuk menentukan nasib Papua. Di Belanda OPM juga melebarkan sayapnya untuk \mendapatkan dukungan kemerdekaan. Pada 15 Agustus 2013 telah dibukanya Kantor Free West Papua Campaign (FWPC) DI Den Haag, pembukaan kantor tersebut bertepatan dengan ulang tahun ke-51 perjanjian New York antara Indonesia-Belanda¹⁴. Fokus OPM ini adalah untuk mendapatkan dukungan internasional khususnya dari Eropa. Dalam salah satu dokumennya, kelompok ini menyebutkan bahwa Papua bukan merupakan wilayah Indonesia adalah karena faktor budaya perbedaan budaya antara penduduk asli Papua dan penduduk Indonesia lainnya. Kelompok ini juga menggunakan isu kerusakan lingkungan akibat dari eksplorasi dan eksploitasi SDA Papua sebagai salah satu propaganda dalam perjuangannya.

Perkembangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)

Timbulnya gerakan separatisme merupakan akibat adanya permasalahan atau perselisihan antara masyarakat dan pemerintah dalam suatu negara yang berdaulat¹⁵. Bentuk protes, kekerasan,

¹⁴ Kepentingan Asing Di Balik *Freedom Flotilla West Papua*. <https://news.detik.com/kolom/d-2346026/kepentingan-asing-di-balik-freedom-flotilla-west-papua> diakses pada 15 mei 2021

¹⁵ Muhammad Nugroho Sugiyatno, Organisasi Papua Merdeka (OPM)) dalam Perspektif

pertikaian, pemberontakan dan perlawanan serta hal-hal lain yang menjadi permasalahan yang ditimbulkan akibat gerakan separatisme. Aksi Pemberontakan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi keselamatan kedaulatan negara sebagai Negara yang sah. Permasalahan seperti kerugian materi hingga jatuhnya korban jiwa merupakan dampak negatif yang ditimbulkan dari aksi pemberontakan. Istilah pemberontakan merujuk kepada perlawanan bersenjata atau gerakan perlawanan tanpa senjata terhadap pemerintah yang sah.¹⁶ Aksi pemberontakan akan terus dilakukan sampai mencapai keberhasilan dengan dapat menduduki wilayah dan membentuk kekuasaan sendiri.¹⁷ Munculnya kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan sejarah integrasi, kondisi sosial dan ekonomi antara Papua dengan Indonesia. Faktor lainnya adalah dukungan-dukungan dari Negara-negara Pasifik selatan kepada Papua sebagai bentuk kepercayaan kepada Papua, bahwa Papua dapat lepas dari Indonesia sebagai Negara yang merdeka.

Sikap Pemerintah Australia Terhadap Konflik Papua

Australia merupakan negara maju yang paling dekat wilayahnya dengan Papua karena itu pengaruh dari

negara tersebut menjadi cukup menentukan terkait sikap Indonesia menghadapi tuntutan kemerdekaan masyarakat Papua. Australia menginginkan Indonesia menghormati penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia di Papua. Meskipun dukungan rakyat Australia sangat kuat terhadap kemerdekaan Papua pemerintah Australia terus menerus menyatakan sikap yang justru sebaliknya Pemerintah Australia berkali-kali menyatakan bahwa mereka tidak berada pada posisi yang menentang kedaulatan Indonesia dengan mendukung kemerdekaan Papua Australia mendukung Indonesia untuk menekan tuntutan kemerdekaan Papua Pesan tersebut berkali kali disampaikan termasuk sikap pemerintah Australia pada 28 Februari 2012 Pemerintah Australia membantah memiliki hubungan dengan suatu forum regional yang mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia yang telah dilaksanakan di Canberra.

Dalam kasus konflik Papua ini pemerintah Australia memiliki sisi pandang yang berbeda dengan rakyatnya, dimana Australia ingin tetap mempertahankan hubungan bilateral yang baik tetapi sebaliknya rakyat Australia mereka menaruh rasa simpati yang besar akan Hak Asasi rakyat Papua dan ingin supaya pemerintah Australia mendukung keputusan rakyat Australia untuk mendukung kemerdekaan Papua atas Indonesia. Dalam kasus Papua Australia seperti berada didalam dilema yang mendesak. Disatu sisi Australia mengakui kedaulatan Indonesia di sisi lain juga menjunjung tinggi HAM. Salah satu tindakan fatal yang dilakukan Australia yaitu dengan pemberian 43 suaka politik kepada pencari suaka politik yang berasal dari Papua yang terjadi pada tahun 2006. Campur tangan Australia

Subjek Hukum Internasional, Makassar. (2017): 25

¹⁶Sugono Dendy ed. Et.all, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kamus Pusat Bahasa Depdiknas, 2003.

¹⁷ Muhammad Nugroho Sugiyatno, Organisasi Papua Merdeka (OPM)) dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional, Makassar.(2017): 26.

tersebut membuat pemerintah Indonesia menaruh sedikitnya rasa curiga kepada Australia, apakah Australia benar-benar berada dipihak Indonesia dalam mengakui dan mendukung kedaulatan Indonesia serta tidak ikut mendukung aksi Papua Merdeka. Terlebih lagi mayoritas kelompok-kelompok di Australia seperti keterlibatan tokoh-tokoh politik seperti Natasha Despoja (Partai Demokrat), Bob Brown (Partai Hijau) dan Greg Sword (Partai Buruh) mendukung pemberian suaka politik kepada warga Papua. Persoalan pemberian suaka Politik kepada 43 warga Papua menimbulkan pandangan baru dari Indonesia kepada Australia. Dimana Australia memberikan dana bantuan untuk para pencari suaka politik yang berasal dari Papua melalui kantor sosial Australia.

Namun dibalik semua pandangan negatif yang mungkin dihadapkan kepada Australia dalam kasus Papua, dan meski banyak gerakan partai maupun Politisi yang mendukung Papua Merdeka seolah ditepis oleh Pemerintah Australia. Pada tahun 2010 dan 2011 bukti Pemerintah Australia yang komitmen mendukung Kedaulatan Indonesia adalah dengan menyediakan dana bantuan pembangunan sekitar 17 Juta Dollar Australia untuk Provinsi Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan kesehatan, insfratruktur dan pendidikan¹⁸. Dalam sistem Pemerintahan Australia juga kebijakan Luar Negeri Australia ditentukan oleh Pemerintahnya, begitupun dengan hubungan diplomatik antara Indonesia-Australia yang didukung oleh Perjanjian Lombok yang telah disepakati bersama oleh kedua negara Indonesia dan

¹⁸ Australia Kucurkan Dana Ke Papua.
<https://edukasi.kompas.com/read/2011/05/04/18403842/Australia.kucurkan.dana.ke.Papua>.
(diakses pada 02 juni 2021)

Australia serta telah mendapat dukungan dari partai-partai besar dan penting di Parlemen Australia¹⁹ Pemerintah Australia mengakui dan mendukung kedaulatan Indonesia seutuhnya hal itu kembali dipertegas dengan adanya perjanjian Lombok yang melibatkan kedua negara Indonesia-Australia yang sudah ditanda-tangani pada tanggal 13 November 2006.

Sikap Rakyat Australia Terhadap Konflik Papua

Rakyat Australia mengangkat isu Hak Asasi Manusia atas kasus Papua barat untuk dapat mendukung kemerdekaan Papua atas Indonesia. Rakyat Australia secara umum menentang Indonesia yang dianggap telah menutup telinga terhadap suara dari rakyat di Papua. Diketahui bahwa Australia memiliki dua Partai besar dan utama yaitu Partai Liberal dan Partai Buruh Australia dalam kancah perpolitikan di Australia. Sistem Pemerintahan Australia cenderung menganut sistem demokrasi Liberal yang berdasarkan dengan nilai-nilai toleransi dan kebebasan berpendapat. Maka dari itu rakyat Australia yang ikut campur dalam kasus Papua dengan mendukung aksi Papua merdeka merasa tindakan yang mereka lakukan tidak melanggar sistem Pemerintahan yang berlaku di Australia walaupun pendapat yang disampaikan rakyat Australia bertentangan dengan Pemerintah Australia yang sudah jelas mendukung kedaulatan Indonesia termasuk Papua.

¹⁹ Meski Politisinya Dukung Papua Merdeka Australia Tetap Setia Dengan RI.
<https://www.republika.co.id/berita/m051au/m051au-19-20210528-18403842-Australia.kucurkan.dana.ke.Papua>
(diakses pada 28 mei 2021)

Pemerintah Australia tidak menyangkal jika memang ada kelompok masyarakat di Australia yang mendukung Papua Merdeka. Salah satu aksi nyata yang dilakukan masyarakat Australia dalam mendukung gerakan Papua Merdeka adalah dengan melakukan aksi unjuk rasa Papua Merdeka sambil membawa dan mengibarkan bendera Kejora sebagai simbol Papua Merdeka. Dalam Hukum yang berlaku di Australia membawa bendera disebut tidaklah melanggar hukum, melainkan jika kelompok tersebut melakukan tindakan yang tidak sesuai atau melanggar hukum Australia pasti akan ditindak tegas.²⁰ Hal tersebut diucapkan oleh Penasihat Menteri di Kedutaan Australia pada 2020.

Suaka Politik Australia

Berbicara tentang suaka politik Papua ke Australia, alasan Australia utama Australia memberikan suaka politik kepada 43 pencari suaka dari Papua adalah karena Australia menaruh perhatian terhadap isu-isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Peristiwa tersebut terjadi pada Januari 2006, di mana pengungsi Papua Barat menggunakan perahu sebagai transportasi mereka untuk mencari suaka politik ke Australia. Pemberian perlindungan ini berimplikasi besar kepada hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, di mana meskipun Australia menganggapnya sebagai bantuan kemanusiaan kepada para pencari suka tersebut, hal itu menimbulkan rasa kepekaan pemerintah Indonesia terhadap kedaulatan Indonesia atas Papua Barat, yang bisa

saja menyebabkan keretakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia.

Tindakan Diplomasi Indonesia Untuk Mencegah Campur Tangan Australia Terhadap Kasus Papua.

Untuk menghadapi internasionalisasi kasus Papua, Indonesia memperkuat diplomasinya baik itu secara bilateral antar negara dan multilateral melalui forum-forum regional dan Internasional. Begitupun dalam menjaga hubungan bilateral seperti Indonesia dan Australia, untuk mendapatkan hubungan yang netral Indonesia-Australia harus bisa saling menghormati kebijakan nasional masing-masing negara dan memperhatikan etika dalam menjalankan hubungan antar kedua negara. Maka dari itu untuk menyikapi internasionalisasi dan campur tangan asing terhadap kasus Papua, Indonesia menggunakan cara diplomasi yakni dengan memperkuat hubungan diplomasi baik secara bilateral ataupun multilateral terkhusus kepada Australia.

Peningkatan hubungan diplomasi Indonesia untuk menjauhkan Australia campur tangan terhadap kasus Papua adalah dengan melakukan kerjasama bilateral dengan Australia didalam beberapa bidang yaitu ekonomi (perdagangan dan investasi), kesehatan dan pendidikan (bantuan dana untuk mahasiswa Indonesia yang menjenjang pendidikan di Australia termasuk juga kepada para perwira militer untuk mengikuti pendidikan). Tindakan diplomasi yang dilakukan Indonesia diharap dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia- Australia.²¹ Selain itu Pemerintah Indonesia juga melakukan tindakan diplomasi dengan

²⁰ Bumi Papua Australia Tegaska Tak Dukung Papua Merdeka. <https://kumparan.com/bumi-papua-/Australia-tegaskan-tak-dukung-Papua-merdeka> (diakses pada 15 mei 2021)

²¹ Adriana Elisabeth, Dimensi Internasional Kasus Papua

meminta negara-negara asing untuk tetap menjaga komitmen yang telah dibuat untuk mendukung Indonesia di Papua. Adapun tindakan diplomasi yang dilakukan Indonesia secara multilateral, melalui forum-forum seperti ASEAN, *ASEAN Regional Forum*, pertemuan tingkat Menteri ASEAN-EU, PBB, dan GNB.

Hubungan Kerjasama Indonesia-Australia Untuk Mencegah Ketegangan Dalam Kasus Papua.

Pada tanggal 13 November 2006 pemerintah Indonesia-Australia melakukan kesepakatan bersama untuk menandatangani sebuah perjanjian kerjasama keamanan dan pertahanan yang disebut dengan Perjanjian Lombok. Perjanjian ini memiliki tujuan agar masing-masing negara sama-sama menjaga kedaulatan negara kedua belah pihak tanpa ada campur tangan dari pihak luar yang dapat menimbulkan kekacauan. Perjanjian ini juga memuat beberapa prinsip-prinsip diantaranya prinsip pernyataan atas kedaulatan, kesatuan, kemerdekaan dan integritas masing-masing wilayah serta tidak mencampuri urusan dalam negeri pada kedua belah pihak. Perjanjian Lombok meliputi beberapa bidang yaitu: Pertahanan, Penegakan Hukum, Kerjasama Intelijen, Kerjasama Maritim, Pemberantasan Terorisme, Keselamatan dan Keamanan, Pengertian Antar Masyarakat dan Manusia.²² Perjanjian ini sebagian merupakan respon dari Indonesia untuk Australia atas kasus pemberian suaka kepada 42 warga asal Papua karena tindakan tersebut merupakan bentuk campur tangan Australia terhadap permasalahan internal negara Indonesia dan tindakan

tersebut dapat meluaskan gerakan separatisme Papua dengan memberikan visa untuk tinggal sementara di Australia

Dengan adanya perjanjian ini kedua negara dapat saling merasakan keuntungan atas integritas masing-masing negara yang terlibat dalam perjanjian. Perjanjian keamanan ini juga berperan sebagai payung hukum atau kerangka kerja sama Indonesia-Australia, untuk kesiapan dalam mempertahankan dan mempertkuat kerjasama bilateral dibidang keamanan, politik, ekonomi.²³ Perjanjian keamanan tersebut membawa hubungan kerjasama Indonesia-Australia kearah yang lebih terkoordinasi lagi dan menegaskan bahwa kedua negara Indonesia-Australia tidak boleh ikut campur dalam masalah Internal dari pihak luar dan harus menghormati kedaulatan satu sama lain hal tersebut jelas mengarah kepada kasus Papua yang ingin mendapatkan Kemerdekaan seutuhnya dan lepas dari Indonesia.

Kerjasama yang masih terjalin antara Indonesia-Australia juga merupakan salah satu bentuk diplomasi Indonesia setidaknya untuk dapat mencegah tekanan publik Australia terhadap kasus Papua di Indonesia. Pada akhir tahun 2015 Indonesia-Australia melakukan pertemuan resmi yang diikuti oleh perdana Dewan Menteri dari kedua masing-masing pihak yaitu Indonesia dan Australia pertemuan tersebut memiliki tujuan utama yaitu untuk membicarakan hubungan kerjasama kedua belah pihak dalam bidang Hukum dan Keamanan. Dalam pertemuan tersebut Indonesia-Australia kembali menegaskan komitmen

²² Sartika Manggabarani, Masalah Papua Dalam Konteks Hubungan Indonesia-Australia

²³ <https://www.abc.net.au/Indonesian/2020-01-04/70-tahun-hubungan-diplomatik-australia-dan-indonesis/> (diakses pada 16 juni 2021)

kerjasama bilateral mereka di bidang Hukum dan Keamanan terkhususnya dalam pemberantasan Terorisme. November 2016, kerjasama antara Indonesia-Australia dalam rangka mewujudkan visi dari Lombok Treaty melalui kerjasama yang terkoordinasi dan berkelanjutan dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan bilateral. Selanjutnya pada tahun 2017 *Ministerial Council Meeting* dilaksanakan untuk membahas isu keamanan. Dalam pertemuan ini Indonesia dan Australia sepakat untuk saling meningkatkan pengertian dalam hubungan bilateral kedua negara.

Kerjasama bilateral yang dijalin oleh Indonesia dan Australia dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-Australia sedang dalam kondisi baik, walaupun hubungan kedua negara sering diterpa berita buruk yang dapat menyebabkan ketegangan bagi kedua belah pihak²⁴, contohnya seperti kasus Papua yang sampai saat ini masih belum menemukan titik penyelesaian. Tetapi hal tersebut tidak menghalangi komitmen kerjasama yang sudah dijalin Indonesia-Australia selama bertahun-tahun.

KESIMPULAN

Kedaulatan Indonesia sejak tahun 1945 sudah didapatkan secara mutlak termasuk Papua. Protes atau gerakan Separatisme yang terjadi di Papua merupakan suatu bentuk wujud rasa kekecewaan dari masyarakat Papua atas kesenjangan dan kurangnya perhatian Pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua. hal tersebut didasari dari

²⁴ Gladys Ariella Kristanto, Analisis Kepatuhan Australia Dan Indonesia Terhadap *Code Of Conduct* Dalam Hubungan Inodensia – Australia Sebagai Konsekuensi Adanya Penyadapan Tahun 2014-2019. (): 512

beberapa faktor yang meliputi yaitu: faktor ideologis, faktor politik dan faktor ekonomi.

Seiring berjalannya waktu kasus Papua berkembang meluas sampai ke kancan Internasional bahkan tak jarang mendapat perhatian dari negara-negara asing terkhusus Australia tetangga dekat Indonesia. Tak heran jika masuknya intervensi dari negara asing pada kasus Internal negara Indonesia. Salah satu tindakan fatal yang dilakukan Australia dalam kasus Papua adalah ketika Australia memberikan visa sementara kepada 42 pencari suaka yang berasal dari Papua pada februari 2006. hal tersebut mengakibatkan memanasnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Akibat peristiwa tersebut Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian Keamanan atau yang biasa disebut dengan Perjanjian Lombok (*Lombok Treaty*) pada tanggal 13 November 2006 tujuannya agar kedua negara sama-sama menjaga stabilitas Kedaulatan masing-masing dari kedua negara Indonesia-Australia.

Hubungan Bilateral antara Indonesia-Australia yang sudah terjalin lebih dari 70 tahun melewati banyaknya peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kesalahpahaman antara kedua negara. Pasang surut hubungan dilateral antara Indonesia dan Australia tidak mengoyahkan keyakinan kedua belah pihak untuk saling mendukung dan menjaga Kedaulatan Indonesia-Australia.

REFERENSI

Buku

RG Djopari, Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka ; Suatu Studi Kasus Tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari Tahun 1964-1984. Jakarta: Universitas Indonesia, 1991.

Sugono Dendy ed. Et.all, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kamus Pusat Bahasa Depdiknas, 2003.

Syamsuddin Haris, *Indonesia Diambang Perpecahan*. Jakarta: Erlangga. 1999.

Syamsul Hadi, *Disintegrasi Pasca Orde baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor, 2007

Vinsensio M.A.
Dugis.2015.Memperkokoh Hubungan Indonesia-Australia. *Jurnal Global & Strategis* Th.9 No.2.

Jurnal

Adriana Elisabeth, *Dimensi Internasional Kasus Papua*

Cecep Zakarias El Bilad,
Konstruktivisme Hubungan Internasional: Meretas Jalan Damai Perdebatan Antarparadigma. : 72-73

Chintya Magdalena Sinaga. *Dinamika Hubungan Australia-Indonesia Dalam Bidang Politik (2010-2015)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. (2014)

Gladys Ariella Kristanto, *Analisis Kepatuhan Australia Dan Indonesia Terhadap Code Of Conduct Dalam Hubungan Inodensia – Australia Sebagai Konsekuensi Adanya Penyardapan Tahun 2014-2019*. (): 512

Muhammad Nugroho Sugiyatno, *Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional*, Makassar. (2017): 25

Rycho Korwa, *Proses Integrasi Irian Barat Ke Dalam Nkri*

Sartika Manggabarani, *Masalah Papua Dalam Konteks Hubungan Indonesia-Australia*

Sugiarto Pramono dan Andi Purwono, *Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional:Gagasan dan Posisi Teoritik*

Yuniarti Dwi Pratiwi, “Mengatasi Gerakan Separatis Melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (Tinjauan Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional)”, *Jurnal Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional*. Vol. 3 No. 1. (2017): 20

Halaman Internet

Australia Kucurkan Dana Ke Papua.
<https://edukasi.kompas.com/read/2011/05/04/18403842/Australia.kucurkan.dan.a.ke.Papua>. (diakses pada 02 juni 2021)

Bumi Papua Australia Tegaska Tak Dukung Papua Merdeka.
<https://kumparan.com/bumi-Papua-/Australia-tegaskan-tak-dukung-Papua-merdeka> (diakses pada 15 mei 2021)

Kepentingan Asing Di Balik *Freedom Flotilla West Papua*.
<https://news.detik.com/kolom/d-2346026/kepentingan-asing-di-balik-freedom-flotilla-west-Papua> diakses pada 15 mei 2021

Meski Politisinya Dukung Papua Merdeka Australia Tetap Setia Dengan RI.
<https://www.republika.co.id/berita/m05lau/meski-politisinya-dukung-Papua-merdeka-Australia-tetap-setia-dengan-ri> (diakses pada 28 mei 2021)

Mike Head, Australia Menggertak
Timor Timur "Merdeka" Atas Minyak
Dan Gas,
[http://www.wsws.org/id/2002/mei2002/
timo-m30.shtml](http://www.wsws.org/id/2002/mei2002/timo-m30.shtml). (diakses pada 04
september 2020)

Restilia Polli. M.si, Teori Hubungan
Internasional, Konstruktivisme.
[http://dosen.uta45jakarta.ac.id/downlot.
php?file=THI%2010%20Konstrukti
vis.pptx](http://dosen.uta45jakarta.ac.id/downlot.php?file=THI%2010%20Konstrukti%20vis.pptx). (diakses pada 13 November
2020)